

Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Covid-19 dan Semasa Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2021

Josia Ananta

Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Palangka Raya

Alexandra Hukom

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Palangka Raya
Jl. Yos Sudarso, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

suryadihendrik35@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to evaluate and compare the financial performance of district local governments in East Kotawaringin before and after the Covid-19 pandemic. The study's population consists of financial data from the regional administration of East Kotawaringin Regency, which is located in the province of Central Kalimantan. This study is a descriptive quantitative investigation. Using SPSS software, the study team performed a Paired T-test analysis to acquire results for homogeneity, normality, and one-way Anova tests. The documentation approach is employed in the sample procedure. Method This study use quantitative descriptive analysis for its analysis. The secondary data used in this study came from books, supporting journals, the internet, and the APBD posture in East Kowaringin Regency between 2018 and 2021.*

Keywords: *PAD effectiveness ratio; Regional financial independence ratio; Degree ratio fiscal decentralization; Shopping compatibility ratio.*

Abstrak. Ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji dan menganalisa perbedaan kinerja keuangan Pemda Kotawaringin Timur sebelum dan Semasa pandemic covid 19. Data keuangan yang digunakan dalam penelitian berasal dari Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk penelitian ini, analisis uji Paired T-test digunakan dengan program SPSS. Dokumentasi digunakan untuk teknik pengambilan sampel. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari postur APBD Kabupaten Kowaringin Timur periode 2018–2021, yang diperoleh dari internet, buku, dan jurnal yang mendukung penelitian ini.

Kata Kunci: Rasio efektivitas PAD; rasio kemandirian keuangan daerah; Rasio derajat desentralisasi fiskal; Rasio kompatibilitas belanja.

PENDAHULUAN

Wabah Corona virus 19 membuat dampak cukup penting pada warga yang berada pada seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Untuk menghentikan penyebaran virus, pemerintah Indonesia mulai mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apa pun didi Kawasan umum. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan PSBB atau dikenal dengan pembatasan aktivitas secara besar-besaran, sebagai upaya mengurangi akibat ekonomi dari pandemi ini (Nasution, 2020).

Dalam era reformasi saat ini, kesempatan untuk pertumbuhan yang adil dan adil lebih banyak. Kebijakan yang mengatur otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat & Pemda, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Pemerintah juga diberi kewenangan untuk meningkatkan pelayanan, demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, dan keistimewaan daerah pada masa kini atau masa depan dalam kebijakan NKRI. Efisiensi pemerintahan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan keterkaitan antara organisasi administratif dengan pemerintah. Pemberian kewenangan yang maksimal kepada daerah serta pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka kesatuan administrasi nasional dapat menimbulkan peluang sekaligus permasalahan persaingan global.

Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan secara administratif dibagi menjadi provinsi dan provinsi, yang meliputi wilayah kabupaten dan kota serta provinsi, kabupaten, dan wilayah provinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Berdasarkan gagasan otonomi dan urusan pembantu, pemerintah daerah selayaknya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. penjelasan pelaksanaannya, UUD 1945 menerapkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah agar membentuk pemerintah daerah guna meninggikan taraf sejahtera masyarakat untuk kerangka NKRI dengan mengasih hak yang terbukti memperkuat dan memberdayakan masyarakat. Menyelenggarakan dan menangani sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan efektivitas

Kinerja, menurut Armstrong dan Baron (1998), adalah hasil kerja yang terkait langsung dengan tujuan strategis perusahaan, kesenangan pelanggan, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kinerja adalah tentang menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya akan menentukan kinerja Anda. Metrik keuangan adalah salah satu jenis alat pengukuran kinerja. Hal ini diperoleh dari perhitungan APBD dari Sistem Pelaporan Tanggung Jawab Daerah.

Peningkatan kinerja juga bermanfaat bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah menggunakan APBD sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan. Boleh juga dikatakan bahwa APBD mewakili program pemerintah pada suatu waktu tertentu. Kapasitas PEMDA Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengawasi keuangan daerah, menunjukkan kapasitasnya untuk mendanai rencana pembangunan negara serta pelayanan sosial daerah. Menurut Mutiha (2016), tolok ukur pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah meliputi independensi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Klaim ini bisa saja dibuat. Tahun fiskal mendatang di area ini.

TABEL 1.

**Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja PEMDA
Kotawaringin Timur 2018smpai 2021**

TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH
2018	1.646.751.376.725	1.650.200.525.696
2019	1.850.333.575.377	1.504.333.307.000
2020	1.429.970.987.608	1.451.667.305.983
2021	1.785.622.866.300	1.863.883.474.600

Sumber: BPS, BPK Kalimantan Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh, sebenarnya penerimaan daerah meningkat seiring dengan peningkatan belanja daerah. Namun karena besarnya pengeluaran sebanding atas dan pendapatan, jadi dapat di kesimpulan bahwa PEMDA tidak bisa menyimpan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan tahun depan. Namun peningkatan membeli dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan daerah pada perubahan tahun lainnya..

Marijana Badun (2009) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh sistem keuangan. Secara khusus, ia mempertanyakan apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang efisien, kapan kondisi apa bidang keuangan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi? Mengetahui kapan sistem keuangan melakukan penyesuaian agar menjadi lebih efisien adalah hal yang mendefinisikan gender. Baik atau buruk. Agar dana transfer yang dijadikan belanja daerah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah itu sendiri, maka penting untuk menentukan apakah pemerintah bisa menanggulangi infrastruktur & fasilitas yang bisa menaikkan pendapatan dalam menghasilkan investasi yang baik.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Derajat desentralisasi fiskal, keselarasan belanja, efektivitas daerah, dan rasio kemandirian dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada masa pandemi semuanya

ditentukan dalam penelitian ini melalui analisis deskriptif dengan metode Paired T-test dengan menggunakan software IBM SPSS .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah dalam menangani pandemi sekaligus mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Jawa Timur dijadikan sebagai populasi penelitian. Dengan kata lain, empat observasi—yaitu, laporan realisasi anggaran selama empat tahun—menjadi sampel data yang diambil dari penelitian ini.

Data sekunder merupakan jenis data yang dipake di penelitian ini. Laporan realisasi dana merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang bersumber dari BPS Kabupaten Kotawaringin Timur dan POSTUR APBD. Pendekatan dekomunisasi merupakan metodologi pengumpulan data DI dignakan pada penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel Rasio Efektivitas PAD

Tabel 2 Rasio Efektivitas PAD Kotawaringin Timur Sebelum pandemi

Rasio Efektivitas PAD				
Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Pad	Rasio	Kemampuan Daerah
2018	1.646.751.376.725	1.650.200.526.696	99,70%	Tidak Efektif
2019	1.850.333.575.377	1.504.300.307.000	123%	Efektif

Tabel 3 Rasio Efektivitas PAD Kotawaringin Timur Setelah pandemi

Rasio Efektivitas PAD				
Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Pad	Rasio	Kemampuan Daerah
2020	1.429.970.987.608	1.451.667.305.983	98%	Tidak Efektif
2021	1.785.622.866.300	1.863.883.474.600	95%	Tidak Efektif

Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas PAD, anggaran PAD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berbeda-beda. Dari hasil yang di dapat, rasio efektivitas PAD pada Tabel 2 dan 3, efektivitas PAD Kotawaringin Timur adalah 99,70% pada tahun 2018, meningkat menjadi 123% pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 98% pada tahun 2020. bisa di lihat Pada tahun 2021, jumlahnya semakin menurun. Tadinya 95%, namun pada tahun 2020 dan 2021 turun dari 98% menjadi 95% hal ini di terjadi di karenakan efek COVID 19

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah PEMDA Kotawaringin Timur Sebelum Pandemi

Rasio Kemandirian		Keuangan Daerah		
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Rasio	Kemampuan Daerah
2018	234,22 M	1.163,14 M	20%	Instruktif
2019	242,41 M	1.296,82 M	18%	Instruktif

Tabel 5, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah PEMDA Kotawaringin Timur Setelah Pandemi

Rasio Kemandirian		Keuangan Daerah		
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Rasio	Kemampuan Daerah
2020	270,00 M	1.206,40 M	22%	Instruktif
2021	276,73 M	1.317,61 M	21%	Instruktif

Dari Tabel 4 dan 5 di atas dijelaskan proporsi kemandirian keuangan daerah mengalami Fluktuasi pada Kabupaten Kotawaringin Timur. di tahun 2018 ialah 20%, namun pada tahun 2019 turun jadi 18%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 22%. Dan itu akan turun menjadi 21% pada tahun 2021. Dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah, hal ini tergolong rendah untuk Prefektur Kotawaringin Timur secara keseluruhan. Sebaliknya jika melihat pola hubungan di Kabupaten Kotawaringin Timur lebih bersifat partisipatif, artinya intervensi pemerintah pusat cukup tinggi.

Variabel Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 6 Rasio Desentralisasi Fiskal PEMDA Kotawaringin Timur Sebelum Pandemi

Rasio Desentralisasi Fiskal				
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Kemampuan Daerah
2018	234,22 M	1.701,13 M	13,76%	Kurang
2019	242,41 M	1.850,33 M	13,10%	Kurang

Tabel 7 Rasio Desentralisasi Fiskal PEMDA Kotawaringin Timur setelah Pandemi

Rasio Desentralisasi Fiskal				
Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Kemampuan Daerah
2020	270,00 M	1.833,18 M	14,72%	Kurang
2021	276,73 M	1.793,62 M	15,42%	Kurang

Angka terendah adalah 13,10% pada tahun 2019, hal ini masuk akal mengingat perhitungan pada Tabel 6 & 7 pada derajat desentralisasi fiskal PEMDA Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2021 baik sebelum maupun semasa wabah virus. Ketika epidemi berakhir pada tahun terakhir tahun 2021, angkanya meningkat menjadi 14,72%, 13,76% pada awal tahun 2018, dan 15,42% pada saat itu. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, rata-rata derajat desentralisasi pada tahun 2018 hingga 2021 sebesar 14,25%, menunjukkan partisipasi PAD terhadap jumlah pendapatan daerah sangat rendah.

Variabel Rasio Keserasian Belanja

Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja PEMDA Kotawaringin Timur Sebelum Pandemi ,Belanja Operasi

Tahun	Balanja Rutin	Total APBD	Rasio
2018	1.512,94 M	1.773,8 M	85%
2019	1.627,63 M	1.993,60 M	81%

Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja PEMDA Kotawaringin Timur setelah Pandemi ,Belanja Operasi

Tahun	Belanja Rutin	Total APBD	Rasio
2020	1.553,57 M	1.915,27 M	81%
2021	1.606,33 M	1.871,88 M	85%

Tabel 10. Rasio Keserasian Belanja PEMDA Kotawaringin timur Sebelum Pandemi ,Belanja Modal

Tahun	Belanja Pembangunan	Total APBD	Rasio
2018	504,58 M	1.773,8 M	28%
2019	544,53 M	1.993,60 M	27%

Tabel 11. Rasio Keserasian Belanja PEMDA Kotawaringin timur Sebelum Pandemi ,Belanja Modal

Tahun	Belanja Pembangunan	Total APBD	Rasio
2020	470,20 M	1.915,27 M	24%
2021	545,46 M	1.871,88 M	29%

Rasio yang keserasian ada dua tipe yaitu pengeluaran operasional dan rasio penanaman modal. Rasio belanja operasional pada Tabel 8 dan 9 menunjukkan Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami naik turun. Angka pra-pandemi hingga pasca-pandemi adalah 85% pada tahun 2018. Kemudian turun menjadi 81% pada tahun 2019, tetap sama atau bertahan di angka 81% pada tahun 2020, dan naik menjadi 85% pada tahun 2021. Sebaliknya, rasio belanja modal pada Perhitungan 10 dan Perhitungan 11 menunjukkan bahwa tingkat belanja modal di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2018 adalah sebesar 28%. Setelah beberapa kali fluktuasi dan di tahun 2019 hingga 27%, turun 24% pada tahun 2020 dan naik lagi 29% di tahun 2021.

UJI PAIRED TEST

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	pre test - post test	14.8500	18.5969	13.1500	-152.2366	181.9366	1.129	1	.461

Gambar 1. Hasil Uji Paired Samples Test

Rasio Kemandirian Daerah dijadikan sebagai variabel terikat pengujian. Dari tabel uji Paired Sample sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansinya adalah $0,461 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan H_a ditolak sedangkan H_o diterima.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Rasio_Kemandirian_Sebelum_Pandemi - Rasio_Kemandirian_Semasa_Pandemi	1.5000	.7071	.5000	-4.8531	7.8531	3.000	1	.205

Gambar 2. Hasil Uji Paired Samples Test

Rasio Kemandirian Daerah dijadikan sebagai variabel terikat pengujian. Dari tabel uji Paired Sample sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansinya adalah $0,205 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan H_a ditolak sedangkan H_o diterima.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Rasio_Derajat_Fiskal_Sebelum_Pandemi - Rasio_Derajat_Fiskal_Semasa_Pandemi	-1.64000	.96167	.68000	-10.28022	7.00022	-2.412	1	.250

Gambar 3. Hasil Uji Paired Samples Test

Derajat Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan variabel terikat dalam pengujian ini. Dari tabel uji Paired Sample sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansinya adalah $0,250 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan H_a ditolak sedangkan H_0 diterima.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Rasio_Keserasian_Belanja_Operasi_Sebelum_Pandemi - Rasio_Keserasian_Belanja_Operasi_Semasa_Pandemi	.0000	5.6569	4.0000	-50.8248	50.8248	.000	1	1.000

Gambar 4. Hasil Uji Paired Samples Test

Variabel terikat dalam pengujian ini adalah rasio pengeluaran operasional. Berdasarkan tabel uji Paired Sample diatas diketahui nilai sig $1000 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak.

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Rasio_Keserasian_Belanja_modal_Sebelum_Pandemi - Rasio_Keserasian_Belanja_modal_Semasa_Pandemi	2.0000	2.8284	2.0000	-23.4124	27.4124	1.000	1	.500

Gambar 5. Hasil Uji Paired Samples Test

Rasio belanja modal merupakan variabel dependen pengujian ini. Dari tabel uji Paired Sample diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansinya adalah $0,500 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan H_a ditolak sedangkan H_0 diterima.

PEMBAHASAN

1. Rasio Efektivitas PAD Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja PEMDA Sebelum & Semasa Pandemi

Kinerja keuangan Pemda Kotawaringin timur sebelum & semasa pandemic tidak berbeda nyata, menurut analisis menggunakan uji t berpasangan rasio efektivitas PAD, karena angka signifikansinya melebihi 0,05. khususnya 0,461. Kinerja Kotawaringin timur 2018 hingga tahun 2019 dinilai sangat efektif dengan hasil sebesar 99,7% dan 123%; Meski demikian, pandemi ini menyebabkan penurunan pada akhir tahun 2021. Meski demikian, tidak ada perubahan karena berdasarkan temuan hitungan rata rata efektivitas Pendapatan asli Daerah lebih besar dari 100% atau 103,9%. Hal ini disebabkan pengumpulan pajak sektor pelayanan publik dan daerah melebihi proyeksi sebelumnya. Apalagi Pemkab Kotawaringin Timur

2. Rasio Kemandirian Daerah Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja PEMDA Sebelum & Semasa Pandemi

Karena angka signifikansi melebihi 0,05 maka analisis menggunakan uji rasio kemandirian daerah Paired Sample T-test menunjukkan di temukan perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Pemda Kotawaringin Timur sebelum dan Semasa Pandemi. Nilainya adalah 0,205. Pencapaian yang lebih besar berarti berkurangnya ketergantungan pada pihak luar untuk mendapatkan dukungan (terutama dari pemerintah pusat dan daerah), dan sebaliknya. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kotawaringin Timur masuk dalam kategori “rendah” antara tahun 2018 hingga tahun 2020, baik sebelum maupun sesudah pandemi, serta struktur hubungan yang saling menguntungkan. % perhitungan dan totalnya di atas

3. Rasio Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja PEMDA Sebelum & Semasa Pandemi

Dikarenakan angka signifikansi melebihi 0,05, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan uji rasio dispersi keuangan uji Paired Sample T-test menunjukkan maka tidak ada perbedaan yang nyata antara kinerja keuangan Pemda Kotawaringin Timur sebelum & Semasa Covid-19. Itu berarti 0,250. Dinyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur relatif sedikit membuahkan hasil. ini menunjukkan tingkat kewenangan dan akuntabilitas yang didelegasikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah federal biasanya tidak sebanding dengan jumlah keseluruhannya. Kinerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur semakin baik terlihat dari peningkatan PAD pada setiap periodenya. Hal ini tidak hanya terlihat dari dukungan PAD terhadap daerah

4. Rasio Keserasian Belanja Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja PEMDA Sebelum & Semasa Pandemi

Dikarenakan angka signifikansi melebihi 0,05, maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji rasio dispersi keuangan uji Paired Sample T-test menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata antara kinerja keuangan Pemda Kotawaringin Timur sebelum dan sesudah Covid-19. Itu berarti 0,250. Dinyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur relatif sedikit membuahkan hasil. Ini menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan akuntabilitas yang didelegasikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah federal biasanya tidak sebanding dengan jumlah keseluruhannya. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur semakin baik terlihat dari peningkatan PAD pada setiap periodenya. Hal ini tidak hanya terlihat dari dukungan PAD terhadap daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Rata-rata Rasio efektivitas PAD dinilai sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 103%.
2. Rata-rata Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 20,25% tergolong pola relasional jelas yang berarti Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kapasitas di bawah angka yang diharapkan dalam melakukan otonomi wilayah.
3. Rata-rata rasio desentralisasi fiskal sebesar 14,25%, means belanja operasional sekitar 83%, rata-rata belanja modal sebesar 26%, termasuk dalam kategori kurang.
4. Rasio Keserasian Belanja, dengan efisiensi operasional sebesar 83% dan moderasi sebesar 26%. Dalam hal ini, banyak sekali orang yang berada pada posisi sebagai operator belanja untuk komponen barang dan jasa yang cukup besar. sangat efisien.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah otonomi secara mandiri, sehingga jika terjadinya hal hal berupa bencana pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada suntikan dana/peminjaman dana dari pemerintah pusat dan daerah lain

2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia dan dengan adanya sumber daya manusia yang meningkat kiranya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D., Fadli, F., & Lismawati, L. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi Global 2008. *Jurnal Fairness*, 3(1), 89–100. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15278>
- Lantowa, F. D., & Machmud, J. (2020). Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL (BPM-PDT) PROVINSI GORONTALO. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(1), 33–43.
- Nurul Sukma Handayani. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur*. 1–12. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengertian-keuangan-daerah-7229819c/detail/>
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Rieuwpassa, A. R., Mangantar, M., & Maramis, J. B. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah di Tiga Kota di Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon). *Jurnal EMBA*, 9(1), 378–385.
- Sari, A. K., & Hardiyanti, W. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 243–249. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1412>
- Syahza, A. (2021). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. *Rake Sarasin*, 2(01), 51.
- Umroh, M., Utami, F. P., & Badruddin, R. (2023). Efek Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan dan Ekonomi Daerah Tahun 2019-2021. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(2), 134–144.
- Wahyuni, E. (2019). Pengaruh Kinerja Penadapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.
- Waoma, S. (2020). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara. *Owner*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.194>
- Yoewono, H. (2019). Analisa Kinerja Keuangan 34 Provinsi Indonesia di Tahun 2018. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 170–197. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.250>

(Herlin & Syurya Hidayat, 2021)Herlin, F., & Syurya Hidayat, M. (2021). Studi komparatif kinerja keuangan daerah Kota Jambi dan Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 601–606. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i3.14357>

(Iii & Penelitian, 2020)Iii, B. A. B., & Penelitian, A. D. (2020). *Demvi Vebiani, 2022 ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA BARAT)* Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. 19.